balairung koran
balkon Spesial
Edisi 96, 12 Maret 2007

18 September 2003
Kurang lebih 60 mahasiswa fakulta
turun ke jalan menentang kebijaka

23 Maret 2002, Sofyan Effendi janji tidak
perlu khawatir tentang kenaikan SPP

26 Desember 2005, masa tra
UGM menjadi BHMN be
pernah se
evaluasi terbuka

Catatan Metamorfosis UGM

Rektor Ideal, Mungkinkah?

Jajanan Khas Grebeg Syawal-Telur Merah

Abdee.Bal

Menerima pendidikan dalam berbagai bentuk adalah hak setiap orang. Mulai yang informal hingga formal. Dalam wilayah negara, pendidikan merupakan bagian kebijakan publik, mereka yang ingin mendapatkan (seharusnya) tidak perlu memberikan kompensasi finansial.

Pendidikan berbeda dengan ***"ruang" pendidikan*** yang terbatas ruang, waktu, atribut, simbol dan serangkaian peraturan. Pada masyarakat, ruang pendidikan menjelma lewat berbagai bentuk sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk mendapatkannya masyarakat melakukan pengorbanan finansial. Pendidikan yang seharusnya melayani malah membebani masyarakat. Padahal pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi tidak berarti pengalihan tanggungjawab negara. Tetap ada kewajiban menyelenggarakan, baik akses maupun pembiayaan pendidikan layak.

Seperti kiprah nyata universitas tertua di Indonesia ini. Sejak lima tahun lalu, UGM ditetapkan statusnya menjadi BHMN. Ini mengakibatkan perubahan organisasi dan administrasi secara bertahap. Salah satunya terjadi pada Rektor selaku pimpinan universitas yang kini diangkat dan diberhentikan MWA. Setelah penyelenggaraan suksesi 2002, isu pemilihan rektor 2007 tengah diperhatikan mahasiswa, dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademika, bahkan masyarakat luar.

Reaksi publik beragam. Kemunculan poster-poster bertajuk 'Dukung Pemilihan Rektor Langsung' di beberapa fakultas menandai bergulirnya wacana baru. Nampak, sekelompok kalangan tidak puas dengan sistem yang dijalankan. Pun Dies Natalis desember 2006, diwarnai aksi menuntut pemilihan rektor langsung.

Perubahan organisasi dan administrasi diharapkan membawa peningkatan fisik dan akademis UGM. Begitu pula ketika suksesi Rektor dilaksanakan. Secara khusus, siapapun yang terpilih dan kebijakan apapun yang terjadi, akan berpengaruh pada segala aspek kehidupan civitas akademika. Secara umum, perubahan turut menentukan opini masyarakat luas, apalagi mereka yang telah mengorbankan banyak kompensasi finansial. Pertanyaan pentingnya, apakah pelbagai wacana pemilihan mampu memunculkan figur rektor ideal? Lebih jauh, seperti apa figur itu? []

Penginterupsi

Pilrek Mundur, Konsekuensi Bisa Diatur
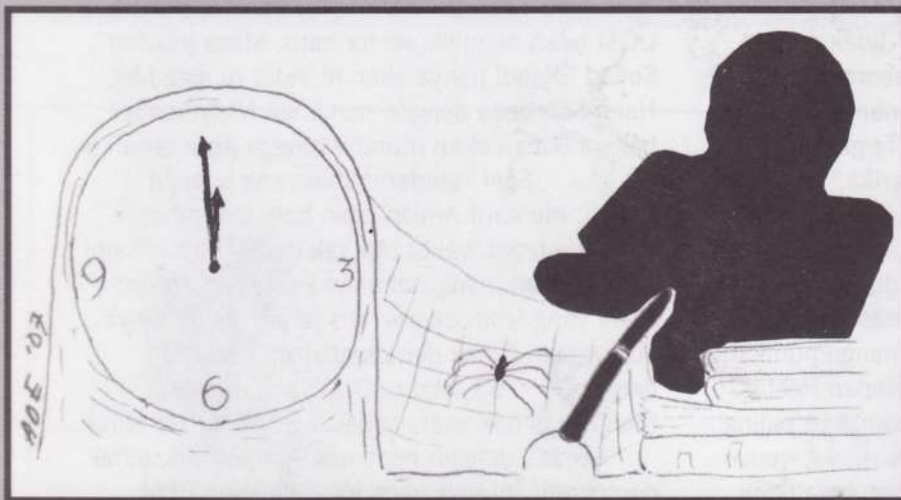
Waktu lima tahun ternyata belum cukup bagi UGM untuk mempersiapkan regenerasi pemimpinnya.

PAGI DI BULAN AGUSTUS 2002, GEDUNG university Center dipadati massa. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM punya hajat. Hari itu kampanye terbuka calon Rektor UGM digelar. Ketiga calonSofian Effendi, Ichlasul Amal, Boma Wikan Tyosoadu visi misi di hadapan hadirin. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada perolehan suara saat pemilihan, sebab segenap anggota Majelis Wali Amanah (MWA) dengan porsi suaranya masing-masing yang menentukan *The Next UGM lecture.*

Hasil pemilihan itulah yang mengantarkan Prof. Dr. Sofian Effendi M.P.I.A menduduki jabatan Rektor UGM periode 2002-2007. Ia tercatat sebagai rektor pertama yang dipilih dan diangkat oleh MWA sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) 153 tahun 2000. (baca: *Napak Tilas Kursi Panas*).

Sudah lima tahun Sofian Effendi menjabat. Statusnya sebagai Rektor UGM akan berakhir pada 31 Maret 2007. Merunut pada PP No. 153 Tahun 2000 tentang Anggaran Dasar UGM, MWA seharusnya telah memulai proses pemilihan rektor (pilrek) baru. Tugas itu terperinci dalam Surat Keputusan MWA No. 12/SK/MWA/2003 BAB XI pasal 45 tentang Pemilihan Rektor. Pada butir pertama mensyaratkan pemilihan rektor "...selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan rektor berakhir." Maka, Pilrek 2007 seharusnya sudah berproses sejak Januari lalu.

Ada banyak hal yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan Pilrek tahun ini. Diawali adanya sengketa kepemilikan hak sebagai penyelanggara, antara MWA periode 2002-2007 (MWA lama) dan MWA periode 2007-2012 (MWA baru). Sengketa bermula saat SA pada 31 Agustus 2006 telah memilih MWA baru. Sementara jabatan MWA lama, berakhir Januari 2007. Hal itu dilakukan karena anggota MWA banyak yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga jumlahnya berkurang hingga setengah dari total 23 orang. "Di sini posisi kami susah. Karena, apakah dengan anggota yang sudah berkurang separo itu keberadaan kami masih legal?" ujar Prof. Dr. Ir. Joedoro Soedarsono, Ketua MWA lama.

Legalitas kepengurusan MWA ini mempengaruhi siapa yang berhak membentuk pantia ad hoc dan memilih rektor. Sesuai dengan Aanggaran Rumah Tangga pasal 45 butir 2, panitia ad hoc yang beranggotakan unsur-unsur MWA, Senat Akademik (SA) dan Majelis Guru Besar (MGB) dibentuk oleh MWA. Panitia ad hoc inilah yang bertugas menyelenggarakan tahapan Pilrek. Akan tetapi, baik MWA lama maupun MWA baru, belum ada yang membentuknya. Kejelasan mulai muncul saat SK

Mendiknas No. 01/MPN.A4/KP/2007 tentang pengangkatan anggota MWA UGM keluar 5 Januari 2007. SK yang baru diterima MWA empat hari kemudian itu, mulai berlaku 1 Februari lalu setelah MWA lama melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan MWA baru melaksanakan pleno pertama.

Pada 29 Januari silam, MWA lama melakukan laporan pertanggungjawabanya. Setelah itu, MWA baru melaksanakan rapat pleno pertama, 1 Februari. Mereka mengadakan rapat untuk membentuk struktur kepengurusan yang baru. Dari situ, terpilihlah Prof. Dr. Amien Rais sebagai ketua dan Dr. Ir. Ali Wibowo, M.Sc. sebagai sekretaris MWA periode 2007-2012. Namun, pembahasan Pilrek 2007 tidak masuk dalam agenda tersebut. Menurut seorang staf MWA yang tidak mau disebutkan namanya, Pilrek akan dibahas pada pleno kedua. "Tergantung kapan Pak Amien pulang dari Amerika," jawabnya ketika ditanya waktu pelaksanaan pleno kedua itu.

Sebuah keputusan besar pun diambil untuk menyelamatkan keberlanjutan suksesi rektor: Pilrek 2007 diundur. MWA lama mengumumkan bahwa proses pemilihan dan penetapan Rektor UGM diperkirakan baru bisa dilaksanakan paling cepat pertengahan April. Konsekuensinya, masa bakti rektor pun ikut mundur, "Sebetulnya tidak mundur, hanya diperpanjang," kilah Joedoro. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kursi kepala universitas akibat pengunduran jadwal suksesi.

Selanjutnya, Joedoro menjelaskan bahwa keterlibatan MWA lama dalam pilrek hanya sebatas memberi usul. "Kami hanya memberi usul mengenai daftar calon anggota ad hoc, tata tertib pilrek, dan anggaran dana pemilihan rektor," ujarnya. Sayangnya, Joedoro merasa tidak berhak untuk mengutarakan siapa saja yang masuk dalam daftar. "Kami juga harus menjaga perasaan mereka. Iya, kalau nama-nama itu diterima, kalau tidak? Telanjur masuk media lagi," imbuh Chamamah, Sekretaris MWA lama yang saat itu turut dalam wawancara. Mengenai anggaran dana, tahun ini MWA mengusulkan anggaran Rp100 juta. Nominal itu dianggap sebanding dengan anggaran tahun lalu yang Rp60 juta.

Rapat pleno kedua akhirnya diselenggarakan 23 Februari lalu. Pertemuan itu tertutup, hanya anggota MWA dan staf berkepentingan yang diperbolehkan ikut. Ruangan itu tampak penuh, meskipun beberapa anggota MWA berhalangan hadir termasuk Mendiknas Bambang Sudibyo.

Jarum jam tepat menunjuk angka lima saat rapat itu berakhir. Sesaat kemudian para peserta keluar ruangan, termasuk Amien Rais. "MWA baru saja mengesahkan rancangan pemilihan rektor UGM 2007," ujarnya. Menurutnya, Pilrek 2007 nanti akan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah membentuk panitia ad hoc. Nama-nama yang diajukan untuk panitia ad hoc dari MWA adalah Dr. Ir. Ali Wibowo, Dr. Sudibyakto dan Dr. Ir. Didik Purwadi. Kemudian, MWA akan melayangkan surat kepada SA dan MGB agar masing-masing segera mengajukan tiga calon untuk melengkapi keanggotaan panitia ad hoc.

Setelah itu, semua proses Pilrek 2007 akan dilakukan oleh panitia ad hoc. Jika tidak ada halangan, selambat-lambatnya awal Juni 2007 UGM telah memiliki rektor baru. Masa jabatan Sofian Effendi hanya akan mundur hingga Mei. Hal ini berbeda dengan perkiraan MWA lama bahwa Sofian akan mundur hingga April tahun ini.

Soal keterlambatan yang telanjur terjadi, menurut Amien lebih baik terlambat daripada tepat waktu tapi tak demokratis. "Kami (MWA) akan mengusahakan Pemilihan Rektor UGM yang lebih demokratis tahun ini," ujarnya. Pernyataan "tidak demokratis" ini berkaitan dengan PP 153 tahun 2000 yang memberi Mendiknas hak suara sebesar 35 % dalam pilrek.

Senada dengan pendapat Amien Rais, pilrek demokratis ini juga yang ingin diusung BEM. Mereka menginginkan seluruh civitas akademika diikutsertakan dalam pemilihan. "Namun, melihat kenyataan yang ada memang akan sangat sulit mewujudkannya. Oleh karena itu, kami perlu berpikir ulang," ujar Agung Budiono, Presiden BEM. Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak berarti BEM akan membatalkan isu Pilrek langsung. "Entah keputusan apa yang akan diambil, intinya tetap akan sama, kami menginginkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilihan itu," tandasnya.

Lontaran BEM itu ditanggapi oleh Amien Rais. Ia menyatakan bahwa universitas di negara manapun, baik negara yang paling demokratis, komunis, hingga negara muslim, tidak ada yang menyelenggarakan pemilihan rektornya secara langsung. "Mahasiswa telah memiliki hak melakukan pemilihan langsung untuk Presiden BEM," katanya. **[Azi, Ima]**

Catatan Suram Menggapai Pentas Dunia

Perubahan status menjadi BHMN, sedikit banyak mengubah wajah pengelolaan UGM.

Di pengujung tahun 2000 ketika PP No. 153 digulirkan rezim Gus Dur, mahasiswa bergerak menolak kebijakan tersebut. Mereka menuntut agar PP tentang perubahan status UGM dari PTN menjadi BHMN dicabut. Penolakan awalnya lebih banyak dalam konteks gerakan ekstra parlementer, yang ditunjukkan dengan membangun opini di kampus maupun menggelar debat publik.

Berlakunya PP tersebut menunjukan otonomi kampus dimulai. Pemerintah pusat secara berkala mengurangi subsidi bagi UGM. Selain itu, otonomi membuat universitas leluasa melakukan berbagai kegiatan usaha, baik untuk mengisi kocek maupun meningkatkan kualitas. Hal tersebut terlihat dengan adanya kebijakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) maupun Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA). UGM sendiri mempunyai beberapa pos pemasukan. Komposisinya 40% pemerintah, 30% mahasiswa (BOP, SPMA, SPP), 25% dari riset dan kegiatan, serta 5% dari usaha Gama Multi Usaha Mandiri.

Kehadiran BOP pada 2002 merupakan usulan tiap fakultas pada Rapat Kerja Universitas (RKU) medio tahun itu. Delapan belas wakil dekanat menyetujui adanya "pungutan" di luar SPP tersebut. RKU dihadiri utusan rektorat, dekanat, dan MWA. Dana ini sedianya digunakan untuk biaya operasional perkuliahan, tutorial, praktek, dan kegiatan akademik lainnya.

Munculnya kebijakan ini sempat membuat mahasiswa melakukan aksi boikot pembayaran. Banyak mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pencabutan kebijakan rektorat terhadap "pungutan" yang dibayarkan mahasiswa tiap semester. Mahasiswa menilai, kebijakan itu merupakan keputusan sepihak rektorat. Di sisi lain, untuk mereduksi hal itu mahasiswa yang aktif di gerakan intrakampus mencoba melakukan intervensi ke MWA. "Kita merapatkan eksistensi mahasiswa supaya terlibat langsung di MWA," kata Suherman, anggota MWA 2002-2003 mewakili mahasiswa.

Kebijakan kenaikan biaya memang murni usulan rektorat karena dikaji dalam rapat MWA. Perwakilan mahasiswa di MWA menyuarakan imbas kebijakan itu ke mahasiswa. "Mahasiswa lemah pada data, wakil universitas datanya lengkap," jelas mantan Ketua Senat DPM itu. "Kita punya peluang banyak kalau menang data dan argumen valid."

Dana BOP tiap tahun mengalami kenaikan dan modifikasi. Melalui SK No.109/P/SK/HT/2006, BOP berubah dari sistem SKS variabel ke SKS variabel penuh. Dalam SK itu, ada tiga hal yang memunculkan multipersepsi. Pertama, berlakunya sistem SKS variabel berlaku surut untuk angkatan di bawah 2006. Kedua, SKS variabel penuh berlaku untuk mahasiswa angkatan 2006. Terakhir, mahalnya biaya kuliah semester pendek.

Hal ini membuat mahasiswa kembali beraksi. Pada 6 dan 20 April 2006, BEM KM melakukan negoisasi dengan pihak rektorat untuk merevisi SK tersebut. Pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan. BEM KM dan BEM seluruh fakultas pun berdemonstrasi menuntut pencabutan SK No.109 di Gedung Pusat, 21 April 2006. Merasa tak ditanggapi, 26 April 2006 aksi kembali digelar. Berlangsung di gedung Pusat Pelayanan Informasi dan Teknologi (PPTIK), tempat RKU SK 109. Meski tak berhasil mencabut kebijakan itu, SK No.109 akhirnya direvisi.

Pada 1 Mei 2006, Rektor menetapkan SK No.194/P/SK/HT/2006. Isinya, sistem BOP dengan SKS variabel penuh diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2006/2007. Bagi angkatan sebelumnya, ketentuan lama tetap digunakan dan SK No.109 tidak berlaku.

Biaya lain adalah SPMA, yang ditegaskan rektorat pada tahun 2003. Mengiringi kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru UGM, lewat jalur Ujian Masuk (UM) UGM yang dimulai pada tahun yang sama. Biaya ini ditentukan saat calon mahasiswa baru mendaftar UM-UGM dan dibayarkan sekali pada tahun pertama. Besarnya sumbangan 0 sampai lebih dari 300 juta rupiah.

Berbeda dengan BOP, dana ini digunakan untuk membiayai pengembangan kualitas akademik, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Pengembangan ini mencakup peningkatan mutu program pembelajaran, pengembangan SDM, serta peningkatan atmosfer akademik.

Besarnya uang yang harus dibayarkan menimbulkan kritik di masyarakat. Ada anggapan UGM hanya menerima mahasiswa yang berasal dari kalangan keluarga mampu. Sentimen ini bukan tanpa alasan, buktinya tahun ini dengan adanya pendaftaran UM-UGM *on line*, opsi SPMA 0 rupiah tak lagi ditawarkan secara otomatis. Opsi tersebut hanya ditawarkan bagi mereka yang orang tuanya berpenghasilan di bawah satu juta rupiah.

Sebenarnya, opsi SPMA 0 rupiah bertujuan memerhatikan masyarakat tidak mampu. Tahun 2003 sebanyak 7 % dari 7.835 mahasiswa tidak mampu dapat ditampung. Menurut Sofian Effendi, mahasiswa yang diterima lewat UM-UGM mendapat subsidi silang. "Sekarang, mahasiswa kurang mampu 18%. Besar sumbangan tidak menentukan sama sekali, semua tergantung hasil tes," tegasnya.

UM-UGM dilakukan untuk menjaring mahasiswa berkualitas. Jatah bagi calon mahasiswa lewat jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) hanya 25 %. "Saat SPMB, subsidi Pemerintah tidak jelas jatuh ke mana, keluarga mampu atau tidak," lanjutnya. Seperti disampaikan Sofian dalam *Laporan Rektor Tahun 2003,* sebanyak 4.979 orang atau 13,2% mahasiswa S-1 reguler UGM memperoleh beasiswa.

Di tengah kenaikan biaya pendidikan, UGM mencitrakan diri di kancah dunia pendidikan. Salah satunya berupaya menjadi universitas riset. Berdasar Keputusan MWA No. 01-K/SK/MWA/2004, UGM menetapkan rencana strategi 2003-2007 sebagai universitas penelitian bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka, berorientasi pada kepentingan bangsa, dan berdasarkan Pancasila.

Untuk menjadi universitas penelitian tingkat internasional dibutuhkan standardisasi. Di antaranya jumlah dosen bergelar doktor, sumber daya manusia yang kompetitif, fasilitas pendukung yang memadai, serta akreditasi akademik bertaraf internasional. "Untuk akreditasi tingkat Indonesia sudah beres. Sekarang dalam rangka akreditasi level internasional. Yang sudah siap salah satunya Fakultas Ekonomi," ujar Ir. Alva Edy Tontowi, M.Sc., Ph.D, Kepala divisi Manajemen Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UGM.

Menurut Sofian, kriteria untuk mencapai Research University cukup berat. UGM telanjur menjadi universitas komprehensif dengan berbagai disiplin ilmu. "Kita harus *excellent* dalam semua bidang, mulai filsafat sampai biotek," urainya.

Kendala lain terletak pada biaya, sumber daya manusia, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa, serta hubungan individual dosen pada mahasiswa. Sebagai contoh, untuk sebuah pembelajaran berbasis *Student Center Learning,* rasio dosen dan mahasiswa yang ideal 1 : 8. "Itu susahnya universitas, tenaga kerja harus banyak, tenaga dosen tidak sembarang, kemudian teknologi intensif internet, laboratorium. Persoalannya, siapa yang membiayai?" keluh Sofian.

Selama ini pembiayaan untuk penelitian didanai UGM. Sumber dana lain berasal dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementrian

Riset dan Teknologi, departemen-departemen, Pemerintah Daerah serta industri. Antara 2002-2005, UGM menghasilkan 2.155 penelitian. *Laporan Rektor Tahun 2003* menunjukkan tak kurang 120 milyar dihabiskan untuk membiayai penelitian.

Salah satu syarat standardisasi Research University yaitu penambahan jumlah dosen bergelar doktor. Implementasinya dengan membudayakan penelitian pada dosen-dosen muda. Dosen diberi berbagai kemudahan serta sarana pendukung untuk meneliti. Pihak rektorat pun mengadakan berbagai *workshop* dan *training,* serta memberi kemudahan akses mencari *funding* penelitian. Iklim dibuat sekompetitif mungkin untuk merangsang dosen-dosen meeneliti. Universitas juga mengalokasikan 40 judul untuk jurnal internasional per tahunnya. "UGM menyediakan insentif untuk dosen-dosen yang mampu mempublikasikan jurnal mereka secara internasional," ungkap Alva.

Sementara itu, apresiasi universitas kepada penelitian mahasiswa ditunjukkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Pengambilan dan survei data di lapangan biasanya menggunakan tenaga mahasiswa. "Sesuai Tri Dharma, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada riset," lanjut dosen Jurusan Teknik Industri itu. Peningkatan kapasitas pendidikan dilakukan dengan menerapkan teori perkuliahan. Sedangkan hasil penelitian merupakan bentuk pengabdian masyarakat.

Hasil penelitian mahasiswa ataupun dosen normatifnya dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat. Secara tidak langsung, hal itu akan berimbas terhadap nama UGM di mata internasional. Hal ini juga menjadi indikator harian *The Times* dalam menobatkan UGM di peringkat 47 dunia bidang ilmu sosial, 70 dalam seni dan humaniora, dan 73 dalam obat alami.

Sepatutnya, ketika UGM menaikkan bendera untuk menjadi Research University dapat didukung oleh seluruh civitas akademika. Ini melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pengajaran, serta membudayakan penelitian.

Biaya pendidikan selama lima tahun terakhir terus naik. Butuh dana besar demi perbaikan mutu pengajaran dan fasilitas. Namun, dalam setiap peneluran kebijakan tidak lepas dari kontroversi. Sosialisasi yang dilakukan tak pernah sampai menyentuh ke seluruh civitas akademika. Suara mahasiswa kerap tertelan deru kebijakan. **[Okky, Ayudi]**

Tabel Perubahan Biaya Pendidikan di UGM 2000/2001-2006/2007

Tabel Perubahan Biaya Pendidikan di UGM 2000/2001-2006/2007

Tahun Ajaran	Kebijakan	Biaya
2000-2001	SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Rp400.000
2001-2002	SPP	Rp500.000
2002-2003	SPP BOP (Biaya Operasional Pendidikan)	Rp500.000 Rp750.000 (eksak) Rp500.000 (non eksak)
2003-2004	SPP BOP SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan)	Rp500.000 Rp500.000 Rp0 s.d Rp100.000.000
2004-2005	SPP SPMA BOP Variabel (maksimal 18 SKS)	Rp500.000 Rp0 s.d Rp100.000.000 Rp75.000/sks/semester (eksak) Rp60.000/sks/semester (non eksak)
2005-2006 2006-2007	SPP SPMA BOP Variabel Penuh (sesuai SKS yang diambil)	Rp500.000 Rp0 s.d Rp100.000.000 Rp75.000/sks/semester (eksak) Rp60.000/sks/semester (non eksak)

(Sumber: Observasi)

Napak Tilas Kursi Panas

Sistem pemilihan Rektor berubah seiring berubahnya status UGM menjadi BHMN. Sistem yang baru ini mengantarkan Sofian Effendi menjabat sebagai Rektor UGM periode 2002-2007.

Sabtu, 16 maret 2002, di balai senat UGM digelar proses Pemilihan Rektor (Pilrek) pertama setelah berubahnya status UGM menjadi BHMN. Dari 25 jumlah anggota Majelis Wali Amanat (MWA) periode 2002-2007, hanya ada 23 anggota yang menghadiri prosesi tersebut. Termasuk Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pilrek juga diramaikan 50 undangan dari Senat Akademik Sementara (SAS).

Berbeda dengan periode sebelum tahun 2002, pengangkatan Rektor tak lagi dilakukan oleh presiden, melainkan langsung oleh MWA. Demikian juga dengan proses pemilihannya. Hal ini terkait dengan perubahan status UGM yang disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) No.153 tahun 2000 tentang UGM ber-Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Akibatnya, terjadi penambahan organ dalam universitas sesuai yang disyaratkan PP, seperti Senat Akademik (SA), MWA, Majelis Guru Besar (MGB), dan Dewan Audit (DA).

Di pertengahan tahun 2001, terbentuknya keempat organ di atas merupakan prasyarat Pilrek 2002. Pembentukannya kemudian diurus oleh SAS. SAS merupakan gabungan dari Senat Universitas dan perwakilan dosen dari setiap fakultas. Selain bertugas membentuk keempat organ tersebut, SAS juga mempersiapkan Pilrek, menyepakati Rancangan Anggaran Rumah Tangga, dan menjalankan fungsi Senat Universitas.

Tak hanya itu, SAS juga membentuk dua panitia ad hoc; panitia ad hoc pembentukan MWA dan panitia ad hoc Pilrek. Panitia ad hoc pembentukan MWA diketuai oleh Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA. Tepat tanggal 1 Februari 2002 anggota MWA diangkat langsung oleh Mendiknas lewat SK Menteri No.38/MPN/KP/2002.

Sedangkan panitia ad hoc Pilrek diketuai oleh Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo. Dalam kepanitiaan ini, ada tujuh orang profesor yang bertugas mempersiapkan langkah awal Pilrek. "Kami menyusun kualifikasi dasar berupa persyaratan

umum untuk kemudian diberitahukan kepada masyarakat. Kemudian menyeleksi pendaftar yang memenuhi syarat untuk menjadi Rektor," jelas Koento. "Siapapun boleh mencalonkan diri dan dicalonkan asalkan memenuhi persyaratan," tambahnya. Syarat itu, misalnya, syarat administratif, latar belakang pendidikan, latar belakang etika dan moral, serta berjiwa Pancasila.

Meskipun Sofian Effendi telah memenuhi persyaratan administratif, awalnya dia tidak berniat menjadi Rektor. Ia mengaku tidak tahu bahwa dirinya dicalonkan. "Tanpa sepengetahuan saya, saya didaftarkan jadi calon Rektor oleh senior," paparnya.

Kemudian, Sofian beserta calon Rektor yang lain harus melewati serangkaian seleksi administrasi yang telah disusun. Dari proses tersebut, terjaring enam orang bakal calon (balon) Rektor, yang kemudian diserahkan pada SAS. Tugas panitia ad hoc pun berhenti sampai di situ.

Proses selanjutnya, SAS harus memilih lima orang calon dan menyeleksinya kembali hingga tersisa tiga calon. SAS yang ketika itu diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Boma Wikan Tyoso M.Sc akhirnya menetapkan tiga nama; Prof. Dr. Ir. Boma Wikan Tyoso M.Sc, Prof. Dr. Sofian Effendi MPIA, dan Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A sebagai calon Rektor. Ketiga nama itulah yang akan diajukan ke MWA. Prof. Dr. Achmad Mursyidi, MSc. Apt., selaku Ketua SA periode 2002-2007 mengatakan bahwa kewenangan SAS hanya sebatas proses pemilihan balon menjadi calon Rektor.

Berdasarkan SK No.02/SK/MWA/2002, Pilrek berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama, dipilih dua orang calon Rektor. Calon-calon tersebut diuji kepatutan dan kelayakannya dengan mempresentasikan visi dan misi mereka. Selain itu, dilakukan juga tanya jawab dengan anggota MWA. Kewenangan ini dilegitimasi dengan adanya PP 153. Meskipun pembagian suara masih melibatkan pemerintah, MWA memiliki legitimasi untuk mengangkat Rektor. Hal ini menunjukkan pembatasan otoritasnya terhadap kinerja internal BHMN. Meski demikian, Mendiknas tetap memiliki suara sebesar 35%. Sedangkan 65% sisanya dibagi rata kepada setiap anggota MWA. Prof.Dr.Ir Joedoro Soedarsono, selaku ketua MWA menganggap hal tersebut wajar. "UGM *kan* masih milik pemerintah dan masih negeri," ungkapnya.

Selain itu, sistem yang ditawarkan PP 153 tidak memberikan ruang partisipasi bagi mahasiswa. Hal ini disepakati Koento, "Kebijakan 35% suara Mendiknas terlampau besar. Namun, mengubah PP juga tidak mudah dan tidak sebentar." Akibatnya, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli (MP) UGM.

Pada tahap ini, Sofian unggul dengan mengantongi 11 suara dari Mendiknas, ditambah 10 suara dari anggota MWA. Sementara itu, Ichlasul Amal dan Boma, masing-masing memperoleh sembilan suara dan dua suara. Dengan demikian, Pilrek tahap kedua pun urung diadakan karena Sofian telah mendapatkan mayoritas suara.

Kemenangan tersebut seolah menjadi jawaban atas prediksi yang dilakukan Keluarga Mahasiswa (KM) UGM pada debat calon Rektor, 23 Maret 2002. Dalam acara tersebut, KM menyelenggarakan polling Rektor. Ketika itu, Sofian mendapat dukungan cukup besar dibanding kedua rivalnya.

Agung Nugroho, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM periode 2005-2006, berpendapat Sofian ketika itu dianggap paling siap menjadi Rektor. "KM melihat Sofian bagus. Sofian kemudian sering diundang menghadiri kajian-kajian yang diselenggarakan BEM," tuturnya.

Sedangkan menurut MWA, kemenangan Sofian disebabkan oleh nilai lebih dari visi misinya. "Sidang MWA bisa memilih dia karena visi misi yang ditawarkan dan kecanggihan dalam mengajukan *paper*," jelas Koento. Senada dengan hal itu, dalam buku profil Rektor UGM, *paper* Sofian banyak memaparkan program kerja yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berorientasi kerakyatan.

Selain itu, sistem yang ditawarkan PP 153 tidak memberikan ruang partisipasi bagi mahasiswa. Hal ini disepakati Koento, "Kebijakan 35% suara Mendiknas terlampau besar. Namun, mengubah PP juga tidak mudah dan tidak sebentar." Akibatnya, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli (MP) UGM.

Dalam perjalanannya, kepemimpinan Sofian menuai banyak permasalahan (baca: Catatan Suram Menggapai Pentas Dunia). Diungkapkan Agung Nugroho, "Saya pikir dengan pencapaiannya, cukuplah sekali saja dia menjabat. Berilah kesempatan kepada yang lain," tuturnya. Namun, siapapun Rektornya, akan percuma bila tidak membenahi sistem. Seperti diutarakan Koento, "PP 153 memang masih menyisakan masalah."

[Nura, Ifa]

Lima tahun sudah Prof. Dr. Sofian Effendi memangku jabatan Rektor Universitas Gadjah Mada. Tak terasa sebentar lagi kepemimpinannya berakhir. Tentunya, tak sedikit kontribusi yang telah diberikan pada UGM. Namun, tak sedikit pula terlontar kritikan atas kinerjanya.

UGM di bawah kepemimpinan Sofian dianggap telah berhasil oleh sebagian pihak. Hal ini diungkapkan Agung Budiono, Presiden Badan

dalam pembangunan sarana dan prasarana penelitian yang lengkap. Keberhasilan Sofian menggagas program itu dibenarkan oleh pernyataan sekretarisnya, Isya Inderawati. "Keberhasilan tersebut membawa UGM dalam kondisi yang semakin baik," ujarnya mantap.

Sebaliknya, Fery Sirait, mahasiswa Fakultas Filsafat 2002 yang aktif dalam BEM KM di masa awal kepemimpinan Sofian, berpendapat lain.

Ketika Mereka Bicara Tentang **Sofian**

Kinerja Sofian Effendi sebagai Rektor UGM tahun 2002-2007 patut menjadi sorotan. Sejumlah kalangan pun menyumbang pendapat.

Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM periode 2007-2008. Kesuksesan Sofian terlihat pada pencapaian prestasi di tingkatan eksternal. Ini ditunjukkan melalui keberhasilan UGM masuk dalam jajaran 100 universitas terbaik di dunia. Keberhasilan itu juga diamini oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Dr. dr. Hardyanto Soebono, Sp. KK (K) yang menjadi calon rektor pada ajang pemilihan rektor tahun ini. Ia mengatakan, secara umum, visi yang dicanangkan dalam masa kepemimpinan Sofian sebagian sudah tercapai. "Banyak kemajuan yang telah dilakukan," ujar Hardyanto. Contohnya, usaha mewujudkan UGM sebagai universitas riset yang telah tercermin

Menurutnya, UGM terkesan cepat puas pada peringkatnya. Dalam hal ini, pihak universitas tidak kritis terhadap asal-usul peringkat yang diraihnya. "UGM hanya menerima saja," tutur Fery. Ditambahkannya lagi, keberhasilan tidak hanya diukur dari peringkat. Kesuksesan UGM idealnya ditunjukkan dengan kontribusi bagi masyarakat sekitar yang kian besar.

Sementara itu, Agung juga menyoroti program peningkatan kualitas mahasiswa. Semisal program Peningkatan dan Pengembangan Kepemimpinan Berkualitas dan Sahabat Percepatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan yang dicanangkan Sofian. Kedua program itu dianggapnya kurang

signifikan karena membuat mahasiswa cenderung study-oriented. Sehingga melupakan masalah di lingkungan kampus. Hal itu menyebabkan berkurangnya minat mahasiswa terhadap kajian sosial politik kampus dan menjadikan mereka buta terhadap realitas. Di samping itu, banyak tindakan yang dinilainya sia-sia, seperti pembangunan gerbang UGM dan Gama Book Store. Agung juga menangkap banyak kesalahan sepele yang berefek besar, seperti pembelian mobil dinas serta Surat Keputusan yang salah cetak.

Di sisi lain, figur Sofian sebagai pemimpin tak luput dari komentar. Isya mengatakan, Sofian adalah pribadi yang pekerja keras dan tepat waktu. Menurut sekretarisnya itu, Sofian selalu memberikan kepercayaan penuh pada seseorang. "Ini membuat saya memiliki ruang untuk berkreativitas," ungkapnya. Visi dan misi Sofian yang jelas juga dinilainya sangat baik. Namun, Isya menyayangkan bahwa pemikiran-pemikiran Sofian terkadang tidak dapat diikuti oleh bawahannya. Tidak berbeda jauh dengan Isya, Agung pun membenarkan bahwa pribadi Sofian sesungguhnya baik, namun berada pada lingkungan orang-orang oportunis, meski tidak semuanya.

Giyono yang menjadi pelayan konsumsi dalam rapat tingkat universitas pun angkat bicara. Bagi lelaki paruh baya ini, Sofian adalah sosok yang ramah. "Pak Sofian selalu tersenyum bila berpapasan dengan saya," ujarnya. Kesejahteraan pegawai pun meningkat. Ini terbukti dari pemberian insentif bagi pegawai, yang tidak dilakukan oleh rektor sebelumnya. Isya pun membenarkan pendapat Giyono tersebut. Tetapi bagi Giyono, hal yang dilakukan Sofian itu memang sudah seharusnya, mengingat harga kebutuhan pokok makin melambung.

Di kalangan mahasiswa, pribadi Sofian dianggap kurang komunikatif dan tertutup. Agung menyebutkan betapa jarangnya mahasiswa dapat bertemu dengan Sofian, apalagi saat demonstrasi. Hal tersebut mengesankan sang Rektor enggan bertatap muka dengan mahasiswa. Kenyataan serupa juga diungkapkan oleh Odit Budiawan, mahasiswa Antropologi 2002. Secara personal, ia mengakui bahwa Sofian Effendi memang sulit ditemui. "Buktinya, kala mahasiswa melakukan demo, sering kali Pak Sofian tidak muncul," ujarnya. Menurut Odit, hal itu berbeda dengan kepemimpinan Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA yang dinilainya sangat kooperatif dengan mahasiswa.

Tetapi, pernyataan itu dibantah oleh Isya. "Bapak pernah kok menemui mahasiswa. Bukannya enggan, tetapi biasanya kalau mahasiswa demo, Bapak kalau tidak sedang rapat, ya keluar kota," jelasnya. Komunikasi dengan pegawai pun dinilainya terjalin baik. Terbukti dengan pembuatan ruang makan yang difungsikan untuk makan bersama sekaligus tempat berkomunikasi.

Di lain pihak, Agung juga menilai masukan dari mahasiswa kurang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di UGM. Ini dibenarkan Fery yang menganggap partisipasi mahasiswa kurang terasa dalam tubuh Majelis Wali Amanat (MWA). "Hanya ada dua orang mahasiswa di sana," ungkap Fery. Namun, menurut Dr. Faturochman, M.A. Sekretaris Senat Akademik, hal itu bukan masalah karena bila keduanya bisa berargumentasi dengan kuat, mereka bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

Hal ini disanggah Fery. Menurutnya, tetap saja demokrasi mayoritas yang berlaku, sehingga kuantitas memegang peranan penting. Pendapat ini didukung oleh Bambang Sigap, alumni Sosiologi UGM angkatan 1981. Pria yang kini menjadi wartawan Kompas itu cukup memperhatikan perkembangan UGM. Dia berpendapat bahwa dua kursi mahasiswa di MWA tidak cukup. "Minimal lima lah, daripada memberi 35% suara pada Menteri Pendidikan Nasional," cetusnya. Diungkapkan Fery, tahun 2002, kenaikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) memicu demonstrasi dan boikot pembayaran BOP oleh mahasiswa. Hal ini karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam penerjemahan makna status Perguruan Tinggai Badan Hukum Milik Negara UGM.

Menanggapi hal tersebut, Isya memberikan pendapatnya. BOP memang mahal, namun pasti terdapat maksud di balik kebijakan ini. "Toh itu sudah diimbangi oleh banyaknya beasiswa," imbuhnya.

Komentar-komentar yang dilontarkan tadi bukan berarti kritik untuk Sofian. Namun, lebih merupakan wujud kepedulian semua kalangan untuk perbaikan kepemimpinan UGM berikutnya. Harapan besar tertumpu pada rektor yang nantinya terpilih, siapapun dia. Dari kalangan mahasiswa, Fery berharap partisipasi warga kampus bisa lebih diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan. Tak sekadar sosialisasi kebijakan yang diinginkan, melainkan andil mahasiswa dalam penetapan keputusan. Tak kalah penting, menurut mahasiswa semester akhir ini, siapapun yang terpilih haruslah anti kapitalis dan rela tidak berpikir untuk menjadi orang kaya. Bambang Sigap berharap UGM mengurangi pembangunan gedung dan lebih memikirkan diperbesarnya akses mahasiswa yang tidak mampu masuk UGM. Sementara itu, Amien Rais sebagai pemerhati pendidikan pun mengharapkan UGM mendapat rektor yang lebih baik lagi. "Syukur-syukur kalau kinerjanya bisa sama dengan yang sekarang," harap Amin dan

23 Maret 2002, Sofyan Effendi dilantik menjadi rektor baru UGM dengan janji (wawancara balkon) tidak perlu khawatir tentang kenaikan SPP, UGM tidak akan menggali dana dengan memberatkan mahasiswa.

4 mei 2002, Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian mengeluarkan surat pernyataan menolak Pemira yang akan dilaksanakan Keluarga Mahasiswa UGM pada 27-28 Mei 2002.

18 Oktober 2003, SK No.12/SK/MWA/2003, menarik program diploma yang dikelola fakultas ke universitas.

13 September 2003, Surat edaran UGM no. 4804/ P III/ TURT/ 2003
Melarang Pedagang Kaki Lima(PKL) berjualan di depan Rumah Sakit Sardjito (RS Sardjito) dengan alasan akan dbangun instalasi hydrant dan penataan lahan.

18 September 2003
Kurang lebih 60 mahasiswa fakultas Filsafat turun ke jalan menentang kebijakan SPMA.

1 Oktober 2003
Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar aksi yang didukung oleh Front Mahasiswa Nasional Universitas Gadjah Mada (FMN UGM), Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (KM UGM), Mahkamah fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

15 Oktober 2003
Dialog antara pihak kampus UGM dan Pedagang Kaki Lima gagal, karena pihak kampus UGM tidak hadir.

30 Desember 2003
Surat No.UGM 6996/ PKS/ 2003
Surat kerjasama UGM dengan PT.Telkom sebagai penyedia jaringan internet.

2 Maret 2004
Ratusan Mahasiswa fakultas Hukum menuntut penyelesaian pembangunan gedung kuliah mereka.

13 April 2004
Aliansi Peduli Kampus Rakyat (APKR) berdemo menolak Biaya Operasional Pembangunan (BOP) dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), Sumbangan Penerimaan Mahasiswa (SPMA) dan komersalisasi pendidikan.

2 Mei 2005, dosen, karyawan, dan mahasiswa bergabung mendemo rektorat menuntut penghapusan kenaikan gaji Rektor beserta segenap jajaran pejabat strukturalnya, peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan, serta transparansi penggunaan BOP dan SPMA.

Mei 2005, pembangunan gama book store terhenti sebab UGM bermasalah dengan izin mendirikan bangunan (IMB), Izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

26 Desember 2005, masa transisi UGM menjadi BHMN berakhir tanpa pernah sempat menyampaikan evaluasi terbuka.

Tersebar kabar di kalangan mahasiswa tentang SK No. 109/P/SK/HT/2006, tertanggal 7 Mei 2006 yang berisi kenaikan biaya pendidikan mahasiswa dengan komponen full-variable.

6 dan 20 April 2006, BEM telah melakukan forum dengan rektorat menolak kenaikan biaya pendidikan mahasiswa, hasilnya tidak menemukan kesepakatan, hanya janji pembahasan ulang.

21 April 2006, menunggu kabar tak pasti, BEM KM dan elemen BEM seluruh fakultas demontrasi ke Gedung Pusat UGM untuk menemui Rektor, menuntut Revisi SK No. 109. Rektor tidak bersedia menemui mahasiswa dan mengutus Sekretaris Eksekutif, Dr. R. Agus Sartono, MBA.

26 April 2006, aksi kedua mahasiswa kedua kalinya, menolak SK. No. 109 di Gedung Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tempat berlangsungnya rapat pembahasan SK No. 109. Rektor tidak hadir.

26 April 2006, Dr. Chairil Anwar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menemui mahasiswa, terjadi kesepakatan revisi yang menyatakan SK tidak berlaku surut.

1 Mei 2006, Aliansi Buruh Yogyakarta mengadakan long march dari tugu yogyakarta sampai Grha Sabha Pramana menolak revisi UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003, seiring keterlibatan UGM dalam revisi UU tersebut.

19 Desember 2006, Dies Natalis 56 diwarnai aksi BEM KM UGM, SEMUD, disusul PMII, LMND, FMN, FPU. Tuntutan dialog dengan pihak rektorat, gagal menemui rektor, diwakili asisten warek bidang kemahasiswaan dan alumni.

Sofyan Effendi Menjawab:

Rektor Itu Jabatan Akademik, Bukan Politik

PEMILIHAN REKTOR UGM TINGGAL menghitung hari. Masa jabatan Sofyan Effendi segera berakhir. Selama lima tahun kepemimpinannya, UGM diwarnai berbagai kebijakan lelaki kelahiran Bangka, 28 Februari 1945 ini. Untuk mengetahui pandangannya tentang UGM dan persiapannya menjelang akhir masa jabatan, Balkon mewawancarai alumnus Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM, ini pada 14 November 2006. Berikut petikannya.

Apa yang Anda lakukan menjelang akhir masa jabatan sebagai Rektor?

Saya mempersiapkan memorandum akhir jabatan, memberikan informasi kepada Rektor yang akan datang tentang arah tujuan yang dasarnya kami letakkan lima tahun ini. Juga tentang hal-hal yang sudah dan harus dilakukan. Sejak 2002, kami telah menetapkan visi menjadi universitas riset bertaraf internasional.

Selama kepemimpinan Anda, adakah perubahan signifikan?

Pertama, kita masuk ranking dunia (peringkat 270 dunia versi harian The Times, Inggris). Kedua, transparansi administratif maupun manajemen jauh lebih baik. Sekarang Rektor tahu budget universitas. Memang kira-kira baru 80% yang melaporkan, namun setidaknya uang penerimaan sudah diketahui.

Ketiga, akuntabilitas lebih baik. Keempat, organisasi universitas lebih tertata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pascasarjana, program multi dan monodisiplin dikelola lebih baik. Kemudian, ada peraturan pengangkatan pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan sistem jaminan sosialnya. Ada lagi kemajuan akses internet, sebelumnya setengah megabyte (Mb) untuk 40 ribu mahasiswa, sekarang 28 Mb, meningkat 56 kali dalam lima tahun.

Menurut Anda, kebijakan yang paling sukses menyangkut mahasiswa?

Belum evaluasi keberhasilannya, sih. Tapi ada penggunaan sistem penerimaan mahasiswa lewat UM (Ujian Masuk). Dari hasil evaluasi prestasi akademik, mahasiswa yang nilainya lebih baik ternyata bukan masuk lewat SPMB, melainkan UM. UM lebih mampu menjaring mahasiswa berprestasi tinggi. Berarti seleksinya tidak salah.

Bagaimana dengan kebijakan yang kontraproduktif?

Misalnya kebijakan reformasi gaji yang menimbulkan demo 2 Mei 2005 (Beberapa dosen dan karyawan UGM berdemonstrasi menuntut dihapusnya kenaikan gaji Rektor, Balkon edisi 77, 16 Mei 2005). Sebenarnya sistem gaji UGM itu skala ganda. Ada gaji pokok, tunjangan gaji pokok, tunjangan struktural atau fungsional yang tergantung pangkat, kemudian honor mengajar ekstra di S2. Ini yang total Take Home Pay (THP).

Tetapi dana pensiun hanya dari gaji pokok. Semisal guru besar gaji pokoknya dua juta, THP-nya.

3-4 kali lipat, tapi pensiun maksimal hanya 75% gaji pokok. Tingkat kesejahteraan turun, pendapatan berkurang 80%. Pensiun menimbulkan ketakutan bagi akademisi UGM. Itu yang ingin diubah. Pensiun jangan hanya dari gaji pokok, tapi THP juga. Kemudian itu mendatangkan protes, karena tidak tahu tujuannya.

Setelah paham mereka mempertanyakan alasan demo. Maka penting transparansi. Mengubah UGM harus bertahap sebab tradisinya sudah terlalu lama. Kebijakan baru harus mengubah mindset, perlu waktu dan Public Relations (PR) yang gencar.

Apakah ada kebijakan mengenai transparansi dan sosialisasinya?

Ada mekanismenya. Tetapi harus diingat, transparansi tidak berarti telanjang habis di muka publik, dapat melalui laporan tahunan penerimaan maupun pengeluaran. Bahkan UGM yang pertama mengeluarkan, universitas BHMN lainnya belum ada. Tidak setiap orang bisa membaca dan menafsirkan transparansi, ada ilmunya untuk audit. Sekarang dibuka Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. Tapi terlalu naïf kalau dianggap PR hanya tugas Rektorat, itu merupakan tugas seluruh masyarakat kampus.

Mengenai perumusan kebijakan, mekanismenya seperti apa?

Dasarnya mufakat. Ada tiga lembaga pembuat kebijakan. Manajemen universitas adalah MWA (Majelis Wali Amanat) yang mewakili tiga stakeholder meliputi pemerintah, masyarakat, masyarakat akademik seperti Rektor, dosen non guru besar, anggota senat, pegawai, serta mahasiswa. Tetapi BEM tidah pernah mau menaruh wakilnya, karena tidak bisa mencapai konsensus siapa yang harus duduk di MWA. Tiga tahun lalu ada wakilnya, setelah itu kosong.

Untuk kebijakan akademik ada Senat Akademik (SA) yang berfungsi memutuskan program yang dijalankan, fakultas yang dibuka, kurikulum, dll.

Lembaga ketiga Majelis Guru Besar (MGB). Bukan pembuat kebijakan, tetapi merekomendasikan dan menegakkan kebijakan kode etik ke Rektor. (Dalam mengambil keputusan) jarang pakai voting, lebih sering konsensus.

Dengan porsi keterwakilan yang kecil, BEM sering kali kalah suara di MWA. BEM pun tidak mengirimkan wakilnya. Tanggapan Anda?

Tentang itu bisa ditanyakan langsung ke Herman (Kimia, 1999. Sekarang dosen bantu FMIPA), dia pernah di MWA (tahun 2002-2003). Sebenarnya cukup banyak usul mahasiswa yang diadopsi. Poinnya, jumlah wakil tidak menentukan keputusan, selama idenya baik dan bisa meyakinkan majelis.

MWA bukan lembaga demokrasi yang memakai voting, juga bukan lembaga politik seperti diinterpretasikan BEM. Dalam lembaga akademik (yang penting) bukan jumlah suara tetapi kualitas. Seperti waktu itu ada usul Herman yang diterima, tapi saya lupa.

Bagaimana dengan posisi Rektor yang menjadi anggota SA sekaligus MWA?

Idealnya dualisasi jabatan harus dikurangi. Rektor dalam MWA tidak punya hak suara, hanya memperlancar informasi, menjawab pertanyaan MWA tentang kebijakan yang dikeluarkan. Kalau dalam SA, Rektor menginformasikan kebijakan akademik yang dijalankan, juga bila ada banyak pro-kontra. Rektor tidak mendominasi pengambilan kebijakan. Tapi saya setuju dengan pemikiran overlaping yang harus dikurangi. Sekarang ada Guru Besar menjadi anggota SA, MWA, dan MGB. Seperti nggak ada orang lain saja.

Mengenai evaluasi, bagaimana mekanisme yang dilakukan UGM?

Rektor memiliki satuan audit internal yang mengawasi penggunaan dana universitas dan fakultas. MWA mempunyai dewan audit, bisa bertanya pada Rektor bila ada kejanggalan. Lalu ada pengawasan eksternal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setiap tahun. Tingkat pengawasan berlapis, dalam keuangan maupun akademis.

Lantas apakah mekanisme pemilihan rektor melalui MWA dianggap telah baik?

Ya, itu kan mekanisme dalam UUD kita. Memang ada suara-suara yang menginginkan metode pemilihan langsung mengikuti pola pilihan jabatan politik. Harus diingat, jabatan rektor itu sifatnya akademik, bukan politik. Jadi menerapkan tata cara politik dalam organisasi akademik saya kira tidak pas. Kemudian kita juga punya konstitusi PP. 153, itu harus diubah dulu baru bisa mengganti mekanisme pemilihan.

Ngomong-ngomong, akankah Anda mencalonkan diri kembali?

Ya kita lihat saja nanti. Preferensinya saya lebih senang kembali ke pengajaran. Sebelum pensiun saya ingin mengajar lagi. Juga menyelesaikan buku supaya ada yang diwariskan ke generasi mendatang.

Menurut Anda, bagaimana sosok pemimpin ideal UGM?

Tugas Rektor bukan hanya menjadi manajer, atau (hanya menjalankan) Good Governance di perguruan tinggi. Yang tidak kalah penting, UGM sebagai pelopor wacana kebangsaan. Rektor UGM dituntut mempunyai perhatian terhadap hal-hal tersebut. Tidak banyak Rektor yang paham bahwa perguruan tinggi tugasnya bukan semata-mata mentransfer pengetahuan lanjutan, yang lebih tinggi ipteknya, tetapi juga menjadi pelopor pemikir nasib bangsa. **[Putra, Fikria]**

Mahasisw Menghen Langsung

Transisi yang terjadi di tubuh UGM pasca BHMN belum membawa perbaikan yang berarti dalam kebijakan mekanisme pemilihan rektor.

PERUBAHAN STATUS UGM BERSAMA tiga perguruan tinggi lain (ITB, UI dan IPB), awalnya adalah keinginan Pemerintah agar perguruan tinggi yang menyandang status BHMN memiliki kemandirian guna meningkatkan daya saing di dunia internasional serta memiliki peran kekuatan moral yang mendukung pembangunan nasional. Konsekuensi status ini adalah pemberian hak otonomi kampus yang diberikan negara kepada universitas agar leluasa mengatur rumah tangganya. Transisi di tubuh UGM sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 153 tahun 2000.

Jabatan seorang rektor dalam suatu BHMN ikut pula mengalami berbagai perubahan pola. Jika sebelumnya seorang rektor dipilih oleh presiden, maka dalam konteks BHMN seorang rektor dipilih melalui lembaga perwakilan bernama Majelis Wali Amanat (MWA). Merujuk Pasal 10 PP 153/2000, MWA merupakan organ pembuat keputusan tertinggi universitas yang mewakili unsur pemerintah (Menteri Pendidikan Nasional dan yang mewakilinya); unsur Masyarakat Umum sebanyak sebelas orang yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubowono, delapan orang tokoh masyarakat dan dua orang alumni universitas; dan unsur Masyarakat Universitas yang terdiri dari sebelas orang yakni Rektor, tiga orang Guru Besar, tiga orang dosen bukan Guru Besar, dua orang tenaga administrasi dan dua orang mahasiswa. Namun sayangnya, porsi suara mahasiswa yang sedikit itu tidak terisi di tahun-tahun belakangan ini.

Pasca tujuh tahun penetapan PT-BHMN di UGM, dinilai menciptakan sistem pengontrolan baru yang dilakukan state dalam kebijakan pemilihan rektor (pilrek) melalui MWA. Seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 PP 153/2000, "Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki oleh unsur menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya".

Proses suksesi rektor suatu perguruan tinggi dianggap sebagai momen penting, dimana penyelenggaraannya diharapkan oleh civitas akademika mampu menjadi contoh penting pilar kehidupan demokrasi di kampus. Divisi Riset BPPM

ya UGM
daki Pemilihan

UGM Balairung mengadakan jajak pendapat pada 388 responden mengenai penyelenggaraan, mekanisme dan aturan-aturan menyangkut pilrek. Karakter responden polling ini adalah mahasiswa S1 dari angkatan 2003-2005 di 18 fakultas.

Ketika dimintai pendapat mengenai landasan hukum pilrek PP 153 Pasal 18 ayat 1, sebanyak 71,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut. Sedangkan 26,3 persen responden menjawab setuju. Kelompok yang tidak setuju diwakili oleh Rizki, mahasiswi Ilmu Keperawatan 2004. "Kesannya tidak adil. Karena otonomi kampus seakan hanya simbol belaka, karena masih ada tangan-tangan pemerintah yang bermain di sana!" ujarnya berapi-api.

Sebaliknya Anto (nama samaran), mahasiswa Akuntansi 2004, berpendapat mekanisme pilrek selama ini dianggap cukup bagus. "Mahasiswa belum mampu dan memiliki keterbatasan informasi dalam suatu proses penyelenggaraan pilrek. Dengan kata lain, mahasiswa belum memiliki tools yang berdasar skill dalam melakukan fit and proper-test seorang rektor. Kita percayakan saja pada orang-orang berkompeten yang duduk di MWA"

Proses pilrek melalui lembaga perwakilan seperti MWA diyakini oleh 88,1 persen responden tidak mampu menghasilkan rektor yang aspiratif. Seperti diungkapkan Rahma, mahasiswi Komunikasi 2003, berasumsi proses pemilihan yang tidak cukup transparan akan muncul kekhawatiran cukup besar menghasilkan rektor yang tidak aspiratif. "Kan kita juga tidak ingin membeli kucing dalam karung." ungkapnya. Hanya sedikit responden (10,8 persen) yang yakin bahwa pilrek melalui lembaga perwakilan MWA akan aspiratif.

Ketika diberi opsi mekanisme alternatif apa yang sebaiknya digunakan dalam pilrek, 70,1 persen responden menjawab pemilihan langsung yang melibatkan seluruh civitas akademika. Seperti alasan Gurnita, mahasiswi Manajemen Hutan 2005, yang menghendaki pilrek langsung. "Kita analogikan saja pilrek dengan pemilihan presiden langsung supaya lebih demokratis dan seluruh civitas akademika dapat memberikan suaranya." Santernya wacana pilrek langsung di lingkungan kampus biru ternyata mendapat tanggapan berbeda dari rektor Sofian Effendi.

Dalam kesempatan audiens yang dilakukan Balairung dengan Sofian Effendi di pertengahan bulan November 2006 lalu (baca : Sofian Effendi Menjawab : Rektor Itu Jabatan Akademik, Bukan Politik), beliau menyatakan mekanisme pilrek melalui MWA sudah tepat dalam kapasitas jabatan rektor yang sifatnya akademik bukannya politik. Pola-pola pemilihan langsung merupakan penerapan dalam kehidupan politik yang tidak seenaknya dapat diadaptasi kedalam lingkungan kampus. Bagi Sofian, tidak pas menerapkan tata cara politik dalam organisasi akademis karena money politic akan bermain di dalamnya. "Demokrasi bukan bentuk terbaik pemerintahan tetapi itulah yang terbaik yang tersedia sekarang. Jangan heran kalau yang terpilih bukan yang terbaik, tapi yang popular." tambahnya.

Sisanya, 24,5 persen responden memilih tetap menggunakan sistem perwakilan namun sebaiknya ada pengurangan porsi suara menteri yang duduk di MWA. Seperti pengakuan Firman yang menganggap campur tangan pemerintah masih diperlukan. "Bagaimanapun juga karyawan dan dosen yang bekerja di UGM kan statusnya masih PNS." ujar mahasiswa Kehutanan tersebut. Hanya 4,1 persen responden menjawab lain-lain.

Dari paparan riset diatas dapat diketahui, meskipun mayoritas (77,3 persen) tidak mengetahui mekanisme pemilihan rektor di UGM, namun sosialisasi mekanisme dan sistem dalam proses pilrek masih dirasa perlu (93 persen). Sejauh pengamatan Balairung, sosialisasi pemilihan rektor beserta mekanismenya memang kurang. Kalaupun ada, baru sebatas difasilitasi oleh perhimpunan dosen UGM yang menamakan diri Gerakan Keadilan dan Kebersamaan (GKK) beserta puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) dengan melakukan aksi Mimbar Bebas di Cemara Tujuh kantor rektorat UGM. Acara itupun baru terselenggara dua kali.

Jumlah populasi mahasiswa UGM yang kurang lebih berjumlah 50.000 orang belum memiliki kontribusi nyata. Peran serta dan keberadaan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan kampus masih dikesampingkan oleh pihak rektorat. Dengan kata lain, bargaining position mahasiswa UGM sangat rendah di kampusnya sendiri. Realitas ini ibarat mutiara hitam yang belum terasah. Semoga pilrek di UGM yang berlangsung kedepan dapat berjalan demokratis dan mampu mengakomodir artikulasi kepentingan kalangan

METODOLOGI POLLING

Pemilihan responden menggunakan teknik penarikan *simple random sampling*. Menjaring 388 responden dari 18 fakultas di UGM. Dengan pembagian berimbang antara jenjang angkatan 2003, 2004 dan 2005. Polling dilakukan semenjak tanggal 22 Januari-2 Februari 2007 oleh Divisi Riset BPPM UGM Balairung.

1. Tahukah anda bahwa masa jabatan rektor UGM Sofian Effendi akan segera berakhir ?
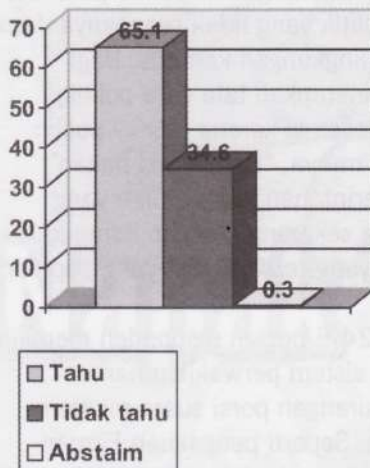
2. Tahukah anda tentang mekanisme pemilihan rektor yang ada di UGM?
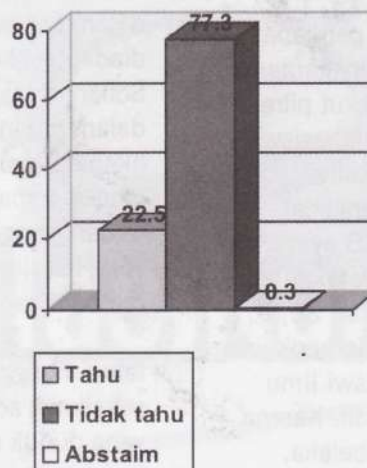
3. Menurut anda, perlukah adanya sosialisasi mekanisme dan sistem pemilihan rektor di UGM?

4. Apakah anda setuju dengan pernyataan PP 153 Pasal 18 ayat 1: "Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki oleh unsur menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya" ?
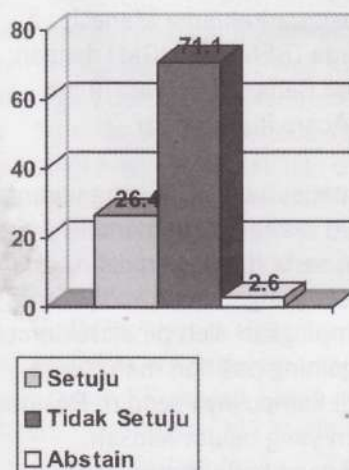
5. Apakah anda yakin bahwasannya proses pemilihan rektor UGM melalui MWA akan menghasilkan rektor yang aspiratif?
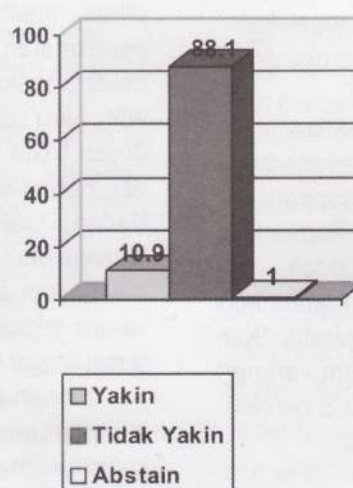
6. Menurut anda, mekanisme alternatif apa yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan rektor saat ini?
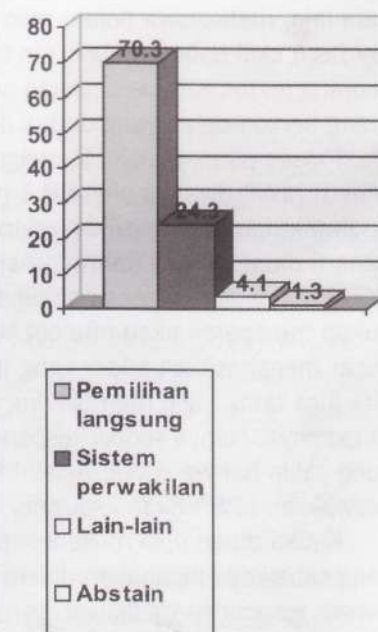
Tim Riset : Hakim, Hanum, Novi, Rois, Nuri, Tiwi, Devi, Manggala, Rhea, Yuli, Kahai, Ghofur, Andya, Rendy, Farid, Galih, Wahyu, Frida

Demokrasi adalah pemerintahan, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Lalu bagaimanakah demokrasi dalam negeri kampus?

Demokrasi per definitionem, seperti dirumuskan secara padat dalam bahasa Jerman, adalah *regierung der regierten* (pemerintahan dari mereka yang diperintah). Dalam teori-teori demokrasi klasik dikenal konsep yang berasal dari Jean-Jacques Rousseau yaitu *volonte generale* (kehendak umum), memiliki arti berupa keputusan publik yang mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi lahir setelah kekuatan zaman proletarian berpindah ke tangan kepala-kepala suku, di masa pemimpin-pemimpin suku menjadi raja yang feodal. Kemudian muncul perasaan untuk memberontak dan melawan tirani monarki yang dijalankan oleh raja-raja feodal dari rakyat pada masa pemerintahan Dinasti Licchavii, India kuno.

Karena lahir sejak zaman kuno, tidak mengagetkan bahwa demokrasi belum menjadi sistem yang sempurna. Ya, konsep demokrasi bukan pemikiran yang telah usai. Ia terus mengalami tahap-tahap transformasi. Pun begitu, demokrasi di era modern merupakan pilihan yang paling baik, ketika berhadapan dengan sistem lainnya. Sistem otokratik-diktatorial misalnya, kenyataan menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan hanyalah penderitaan kehidupan manusia. Dalam sistem tersebut kekuasaan hanya mengandalkan peran sekelompok kecil orang dengan hak-hak istimewanya serta mengabaikan rakyat (*demos*) yang terbukti dalam sejarah membawa bencana bagi kebersamaan. Sedangkan demokrasi idealnya mampu menjawab kekurangan sistem tersebut, yakni dengan membentuk sistem sosial yang lebih berkeadilan.

Dalam pelaksanannya, paham demokrasi di Indonesia sulit untuk berkembang. Padahal menurut Rendra, kesulitan berkembangnya demokrasi tidak berhubungan dengan kemungkinan bahwa demokrasi tidak memiliki akar budaya di sini. Pengembangan demokrasi merupakan sebuah kerja kebudayaan. Walaupun begitu sebenarnya bangsa ini telah memiliki dasar berdemokrasi seperti diungkapkan Hatta (1960). Ia memperlihatkan sekurang-kurangnya ada lima anasir demokrasi di Indonesia, yaitu rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja.

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana penerapan demokrasi dalam tatanan kehidupan kampus. Theodore Brameld, seorang filosof pendidikan, mengemukakan empat filosofi pendidikan mendasar, salah satunya adalah rekonstruksionisme. Dalam paham ini, ia meadang sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Kampus seperti sebuah negara kecil yang butuh demokrasi dengan 'd' kecil. Mahasiswa sebagai intelektual seharusnya memiliki peran besar untuk mengontrol 'yang berada di atas' saat mereka lupa.

Kampus merupakan institusi pendidikan yang menjadi gudang pengetahuan. Menurut Habermas, pengetahuan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, sebagai *instrumental knowledge,* yang bertujuan mengontrol, memprediksi, memanipulasi dan eksploitasi terhadap objeknya. Kedua, sebagai *hermeniutic knowledge* yang menyatakan tugas pengetahuan hanyalah untuk memahami. Ketiga, sebagai *critical knowledge* yang menjadi refleksi kritis ke arah transformasi sosial menuju sistem yang lebih adil. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai rakyat kampus berhak untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi kampus. Tapi siapa yang tahu kapan demokrasi kampus biru ini berjalan baik jika dalam pemilihan kepala kampus saja tak ada keterlibatan suara mahasiswa. (Devi)

Abdee.Bal

DEMOKRASI dan NEGERI KAMPUS

DUL GEMPLO
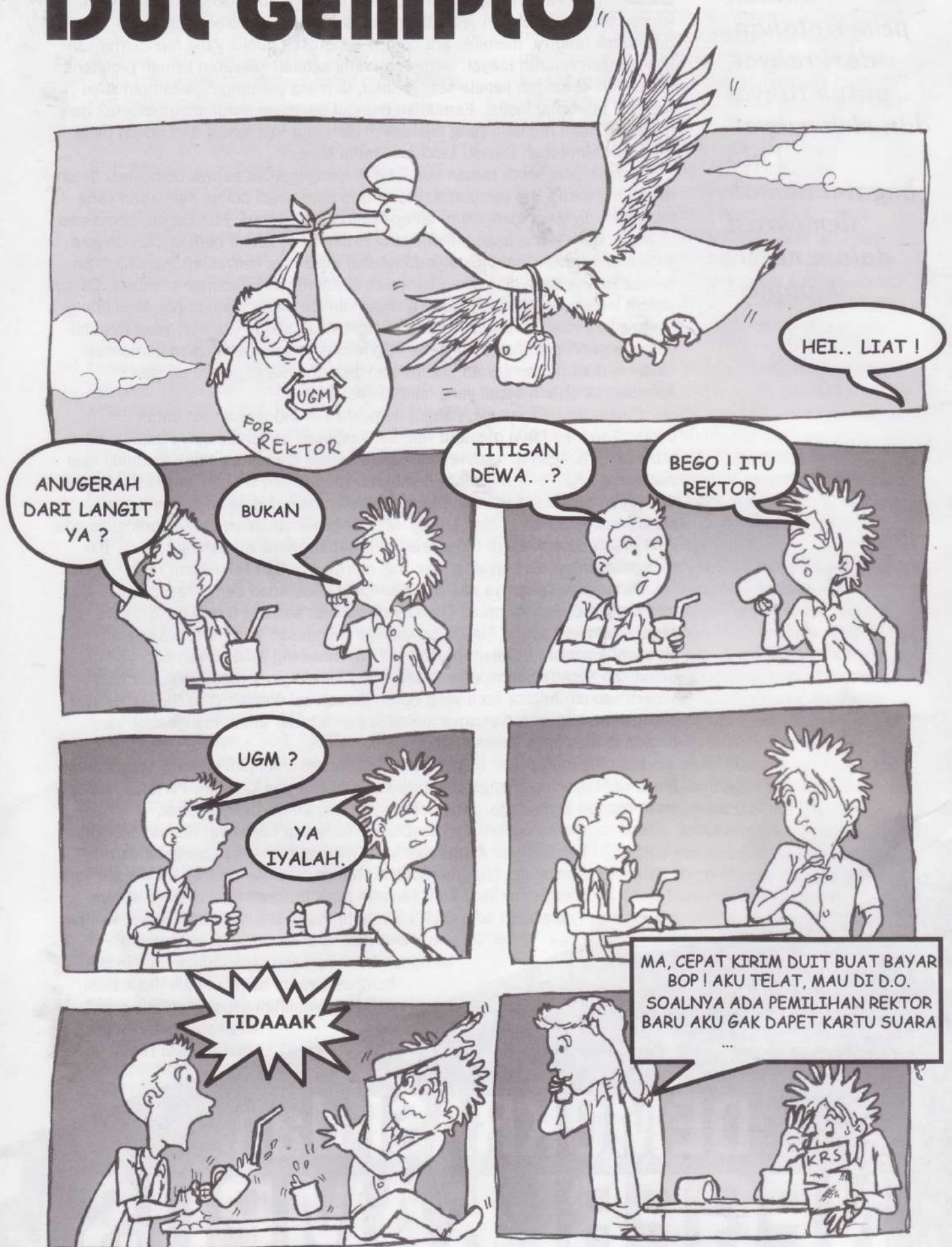
UGM
FOR REKTOR
HEI.. LIAT !
ANUGERAH DARI LANGIT YA ?
BUKAN
TITISAN DEWA. .?
BEGO ! ITU REKTOR
UGM ?
YA IYALAH.
TIDAAAK
MA, CEPAT KIRIM DUIT BUAT BAYAR BOP ! AKU TELAT, MAU DI D.O. SOALNYA ADA PEMILIHAN REKTOR BARU AKU GAK DAPET KARTU SUARA ...
KRS

Launching IBSF (Indonesia Biotechnologi Forum) regional Yogyakarta & Seminar "Biotecnologi as a Challenge"

Unit 1 Fak. Farmasi UGM
25 Maret 2007
08.00 WIB - selesai

Launching Jurnal
28 April 2007

Diskusi umum Balairung Koran "Rektor Ideal di Mata Publik"

12 Maret 2007
Gelanggang UGM

Sudut

+ Pilrek Mundur
- Wah ada yang masa jabatannya nambah !!!

+Wacana Pilrek mentok PP 153
- PP atau wacananya yang berubah?

DITERBITKAN OLEH BPPM UGM BALAIRUNG Penanggungjawab: Nurhikmah **Koordinator:** Eka Saputra **Tim Kreatif:** Abdee, Ayudi, Ningsih, Tiwi **Editor:** Intan, Ides, Esthi, Surip, Ikhdah, Hakim, Hano **Redaksi:** Azi, Ima, Okky, Ifa, Nura, Fikria, Upik, Wiwi, Novi **Riset:** Devi, Annisa **Perusahaan:** Ika, Teguh, Tamimi, Arif, Dewi, Fazli, Lala, Ajeng, Fajar, Irham **Produksi:** Ade, Agus, Ipang, Irsyad **Cover :** Abdee

ALAMAT REDAKSI, SIRKULASI, IKLAN DAN PROMOSI: BULAKSUMUR B21 Yogyakarta 55281, Fax: (0274) 566171 E-mail: balkon_ugm@lycos.com CONTACT PERSON: Ningsih (081804190061)
REKENING BCA YOGYAKARTA No. 0372355296 A.N. DIAN MENTARI A.
GRATIS DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PARKIR TP, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN DAN BULAKSUMUR B21.
Redaksi menerima tanggapan, kesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui alamat E-mail: balkon_ugm@lycos.com__atau sms ke 08562870417,085225035743 atau juga dapat disampaikan langsung ke kantor Redaksi *Balairung* di Bulaksumur B21.

PEMASANGAN IKLAN DAN PROMOSI
Ningsih 081804190061 | Teguh 085643075842

PC CD-ROM

ELITE FOR

AIR SOFT GUN
GAME

MARET 2007 (KOMP@K JAKAL)
APRIL 2007 (KOMP@K WAHID HASYIM)

Tempat Cukur Cowok Cerdas

JL. Kaliurang Km 4,5 (Pintu Utara MM UGM)
JL. Wakhid Hasyim, Condongcatur (300m utara selokan Matara
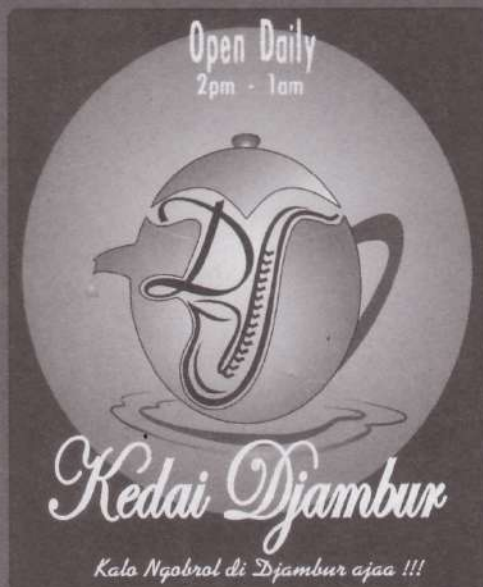
KEDAI DJAMBUR

Jl. Gambir 17, Karangasem Baru CT X Yogykarta, 55281, Telp 08886828538

Menikmati suasana nyaman, rileks nan santai di udara terbuka sebagai tempat ngobrol bukanlah hal sulit. Kedai Djambur hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Kedai yang terletak di utara Kampus UGM dan UNY ini menawarkan suasana taman dengan berbagai macam menu yang variatif, mulai dari aneka teh, kopi, jus segar, es asem jawa, coklat panas, milkshake, hingga makanan ringan seperti *french fries*, roti bakar, *chicken nugget*, dan lain-lain. Harga yang ditawarkan juga sangat murah dan variatif. Pastinya sangat sesuai untuk kantong anda.

Kedai Djambur yang buka sejak Oktober 2006 menawarkan suasana berbeda namun unik yang tidak dimiliki café-café lain di Yogyakarta. Anda bisa mengobrol santai sambil menikmati minuman hangat atau dingin serta makanan ringan yang tersedia di kedai ini. Harga terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas rasa dan layanan adalah alasan utama mengapa anda patut mengunjungi kedai ini.

Walaupun masih baru namun antusias masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa sangatlah tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya pengunjung yang datang ke Kedai Djambur setiap harinya. Bahkan pada event-event tertentu seperti Valentine's Day yang baru saja berlalu, pengunjung membludak hingga mereka yang datang belakangan tidak mendapat tempat duduk dan terpaksa duduk diatas karpet yang memang disediakan bagi pengunjung yang tidak mendapat tempat untuk duduk.

Anda dapat pula menikmati *live music* yang disuguhkan pada momen-momen tertentu yang dapat membuat Anda betah berlama-lama hingga saat kedai tutup sekitar pukul 1 malam. Jika Anda belum puas dan masih ingin menikmati suasana nyaman dan rileks Kedai Djambur, Anda dapat datang kembali keesokan harinya saat kedai buka yaitu pukul 2 siang.

Teman ngobrol yang enak adalah bumbu penyedap kunjungan Anda ke café manapun. Jika Anda datang berdua dengan teman dekat Anda, silakan memilih tempat duduk yang romantis di lesehan untuk 2 orang atau di kursi yang nyaman di bawah pepohonan. Jika Anda ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman Anda, Anda dapat memilih tempat di lesehan utama yang dapat menampung hingga 10 orang. Namun, dengan siapapun Anda menghabiskan waktu di kedai ini, jangan lupa memesan es asem jawa atau teh susu yang merupakan minuman andalan kedai ini.